

**SINERGITAS BAPPEDA LITBANG DENGAN
STAKEHOLDERS PADA PENYELENGGARAAN
INFORMASI GEOSPASIAL DI KOTA PALEMBANG
DALAM MENCAPAI *BHUMANDALA AWARD* TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Administrasi Publik



Oleh :

RAFFI DANUZAKIYAN ALMASRI

07011382126226

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**SINERGITAS BAPPEDA LITBANG DENGAN *STAKEHOLDERS* PADA
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KOTA
PALEMBANG DALAM MENCAPAI *BHUMANDALA AWARD* TAHUN 2024**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik**

Oleh :

RAFFI DANUZAKIYAN ALMASRI

NIM. 07011382126226

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Maret 2025

Pembimbing

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP.196911101994011001



Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**SINERGITAS BAPPEDA LITBANG DENGAN *STAKEHOLDERS* PADA
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KOTA
PALEMBANG DALAM MENCAPAI *BHUMANDALA AWARD* TAHUN
2024**

SKRIPSI

Oleh:
RAFFI DANUZAKIYAN ALMASRI
NIM. 07011382126226

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 12 Maret 2025

Pembimbing:

Dr. M. Nur Budiyanto, Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Tanda Tangan



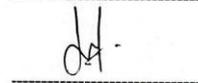
Penguji:

1. **Drs. Mardianto, M.Si**
NIP. 196211251989121001

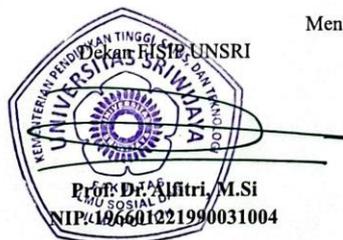
Tanda Tangan



2. **Lisa Mandasari, S.I.P., M.Si**
NIP. 198603272023212029



Mengetahui,



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raffi Danuzakiyan Almasri

NIM : 07011382126226

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Sinergitas Bappeda Litbang Dengan *Stakeholders* Pada Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Kota Palembang Dalam Mencapai *Bhumandala Award* Tahun 2024” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Palembang, 10 Maret 2025



Raffi Danuzakiyan Almasri

Nim 07011382126226

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bukan tentang seberapa banyak yang telah kita hilangkan. Namun
tentang seberapa banyak yang masih kita miliki”

(Tony Stark - 2019)

Atas rahmat dan ridho Allah
SWT. Skripsi ini saya
persembahkan kepada:

1. Orang Tua, beserta Keluarga Tercinta.
2. Dosen Prodi Administrasi
Publik Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
3. Almamater Kebanggaan
Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

ABSTRAK

Pemerintah Kota Palembang berupaya meningkatkan tata kelola informasi geospasial guna mendukung pembangunan berbasis data yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan informasi geospasial yang baik menjadi salah satu faktor utama dalam perencanaan kota, yang diakui melalui penghargaan Bhumandala Award. Namun, terdapat tantangan dalam sinergitas antar-*stakeholder*, khususnya dalam koordinasi dan komunikasi antara Bappeda Litbang dan *stakeholders* terkait. Meskipun telah ada kebijakan mengenai penyelenggaraan informasi geospasial, pelaksanaannya di lapangan masih menemui kendala teknis dan administratif, yakni keterbatasan sumber daya manusia dan perbedaan prioritas antar-*stakeholder*. Penelitian ini menggunakan teori sinergitas Najiyati dan Rahmat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat sinergitas Bappeda Litbang dengan *stakeholders* dalam penyelenggaraan informasi geospasial di Kota Palembang. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini berfokus pada aspek komunikasi dan koordinasi sebagai dua elemen utama dalam membangun sinergitas yang efektif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari instansi terkait serta analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas dalam penyelenggaraan informasi geospasial telah berjalan dengan baik, terutama dalam komitmen bersama antar-pemangku kepentingan. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti permasalahan teknis sumber daya manusia dalam pelaksanaannya, dan perbedaan prioritas yang dapat menghambat integrasi data geospasial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi dan komunikasi yang lebih terstruktur agar sinergitas antar-*stakeholder* dapat lebih efektif dalam mendukung pemanfaatan informasi geospasial. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan forum koordinasi yang lebih aktif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang geospasial, serta penguatan regulasi yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing *stakeholders* secara lebih jelas. Dengan langkah-langkah tersebut, Kota Palembang diharapkan mampu meningkatkan tata kelola informasi geospasial secara berkelanjutan dan memperbesar peluang meraih kembali *Bhumandala Award*.

Kata Kunci: Sinergitas, *Stakeholder*, Informasi Geospasial, Bhumandala Award.

Pembimbing,



Dr. M. Nur Budiwanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

Palembang, Maret 2025

Ketua Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiwanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

ABSTRACT

The Palembang City Government strives to enhance geospatial information management to support more effective and sustainable data-driven development. Proper geospatial information management is a key factor in urban planning, as recognized by the Bhumandala Award. However, challenges remain in fostering synergy among stakeholders, particularly in the coordination and communication between Bappeda Litbang and relevant stakeholders. Although policies on geospatial information management have been established, their implementation in the field still faces technical and administrative obstacles, such as limited human resources and differing priorities among stakeholders. This study employs the synergy theory by Najiyati and Rahmat. It aims to analyze the supporting and inhibiting factors affecting the synergy between Bappeda Litbang and stakeholders in the implementation of geospatial information management in Palembang City. Using a descriptive qualitative research method, this study focuses on communication and coordination as the two main elements in building effective synergy. Data were collected through in-depth interviews with relevant institutions and policy document analysis. The findings indicate that synergy in geospatial information management has been well-established, particularly in the shared commitment among stakeholders. However, several challenges persist, such as technical issues related to human resources and differences in priorities that hinder geospatial data integration. Therefore, strengthening a more structured coordination and communication mechanism is essential to enhance stakeholder synergy in utilizing geospatial information. Efforts can be made by establishing a more active coordination forum, improving human resource capacity in the geospatial field, and reinforcing regulations that clearly define the roles and responsibilities of each stakeholder. With these measures, Palembang City is expected to improve sustainable geospatial information management and increase its chances of reclaiming the Bhumandala Award.

Keywords: Synergy, Stakeholders, Geospatial Information, Bhumandala Award.

Advisor,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

Palembang, March 2025

Head of the Public Administration Department

Faculty of Social and Political Sciences

Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat waktu yang berjudul “Sinergitas Bappeda Litbang Dengan *Stakeholders* Pada Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Kota Palembang Dalam Mencapai *Bhumandala Award* Tahun 2024”. Sholawat serta salam peneliti haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafa’at dalam menuntut ilmu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan masa studi program pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, nasihat dan bimbingan :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan Anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan mudah dan lancar.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, Masri dan Kurnia yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan serta doa yang tiada hentinya untuk penulis sehingga dapat melaksanakannya dengan lancar.
3. Kedua adik penulis, yaitu Naufal Danuzahran A. dan Habib Danuzikran A. yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., MSi selaku Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M Selaku Wakil Dekan I Bidang Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Hoirun Nisyak, S. Pd., M.Pd Selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Andries Lionardo, M. Si Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal peneliti mengembang studi di Jurusan Administrasi Publik, FISIP Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Administrasi Publik serta Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
12. Mba Raflesia Adesty selaku admin jurusan Administrasi Publik kampus Palembang yang selalu membantu penulis dalam mengurus administrasi kampus.
13. Kepada keluarga besar penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah bersedia memberikan dukungan kepada penulis.
14. Orang terkasih yaitu Salsabila Nazhifah, Dwi Winata, Azzhara Fatian Fassya, dan Putri Meysha Claudia yang telah selalu ada disamping penulis selama mengemban perkuliahan dan saling memberikan dukungan dan bantuan hingga akhir penyelesaian penyusunan.
15. Teman – teman dan sahabat seperjuangan Jurusan Administrasi Publik Angkatan 2021.
16. Sahabat – sahabat penulis yaitu M. Rafialdi, M. Irfan, dan M. Youliyo Adzis yang selalu bersedia memberikan masukan, semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah berproses, sabar, berusaha dan tetap semangat walaupun banyak rintangan untuk menyelesaikan skripsi. Terimakasih tetap memilih hidup dan merayakan diri sendiri sampai di titik ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dan menghargai saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan Skripsi ini.

Palembang, Maret 2025

Raffi Danuzakiyan Almasri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.2 Sinergi.....	13
2.2.1 Kriteria Sinergitas	15
2.3 <i>Stakeholder</i>	20

2.3.1	Klasifikasi <i>Stakeholder</i>	21
2.3.2	Analisis Peran <i>Stakeholder</i>	23
2.3.3	Fungsi dan Tujuan <i>Stakeholder</i>	25
2.4	Informasi Geospasial	25
2.4.1	Tujuan Informasi Geospasial Terhadap Pembangunan Daerah.....	29
2.4.2	Mekanisme penyelenggaraan Informasi Geospasial Terhadap Pembangunan Daerah	31
2.5	<i>Bhumandala Award</i>	33
2.5.1	Konsep <i>Bhumandala Award</i>	33
2.5.2	Kriteria Penilaian <i>Bhumandala Award</i>	34
2.5.3	Pencapaian Kota Palembang Dalam <i>Bhumandala Award</i> Tahun 2024.....	38
2.6	Teori yang Digunakan	39
2.7	Penelitian Terdahulu	42
2.8	Kerangka Pemikiran	49
BAB III METODE PENELITIAN		50
3.1	Desain Penelitian	50
3.2	Definisi Konsep	51
3.3	Fokus Penelitian.....	53
3.4	Sumber Data	54
3.4.1	Data Primer.....	54
3.4.2	Data Sekunder	54
3.5	Informan Penelitian.....	55
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.7	Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		60
4.1	Gambaran Umum Bappeda Litbang Kota Palembang.....	60

4.2 Gambaran Umum Kota Palembang	61
4.3 Hasil Penelitian	62
4.3.1 Koordinasi.....	63
4.3.2 Komunikasi.....	77
4.4 Pembahasan	84
Tabel 4. 2 Matriks Hasil dan Temuan Penelitian	87
BAB V PENUTUP	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran	91
5.2.1 Saran Teoritis	91
5.2.2 Saran Praktis	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tampilan Peta Geospasial Kelurahan Lorok Pakjo, Kota Palembang	26
Gambar 2. 2 Tampilan Situs Web <i>Geoportal</i> Kota Palembang	27
Gambar 2. 3 Rencana Pembangunan Jalan Kota Palembang	30
Gambar 2. 4 Dokumentasi Penerimaan <i>Bhumandala Award</i> Tahun 2024.....	38
Gambar 2. 5 Kerangka Pemikiran	49
Gambar 3. 1 Model Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman	57
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kota Palembang	61
Gambar 4. 2 Peta Batas Administrasi Kota Palembang	62
Gambar 4. 3 Workshop Pelaksanaan Informasi Geospasial di Kota Palembang	71
Gambar 4. 4 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Kota Palembang	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Matriks Analisis Peran <i>Stakeholder</i> Menurut Bryson	24
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian	53

DAFTAR SINGKATAN

BAPPEDA LITBANG	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
BIG	: Badan Informasi Geospasial
JIGN	: Jaringan Informasi Geospasial Nasional
JIGD	: Jaringan Informasi Geospasial Daerah
PUPR	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DISKOMINFO	: Dinas Komunikasi dan Informatika
SRGI	: Sistem Referensi Geospasial Indonesia
SIG	: Sistem Informasi Geografis
GIS	: Geographic Information System (Sistem Informasi Geografis)
GPS	: Global Positioning System
UAV	: Unmanned Aerial Vehicle (Drone)
SDM	: Sumber Daya Manusia
IDS	: Infrastruktur Data Spasial
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, terus berupaya mengembangkan kualitas tata kelola perkotaan dan pelayanan publik. Kota ini dihadapkan pada tantangan besar untuk mengelola wilayah yang semakin padat, baik dari aspek pembangunan fisik maupun kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, penting bagi Kota Palembang untuk memiliki sistem informasi yang mampu menyajikan data dan informasi secara akurat dan *real-time*. Informasi yang tersusun dengan baik ini akan menjadi dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan, khususnya untuk perencanaan wilayah yang efektif dan efisien. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, diharapkan Palembang mampu memanfaatkan teknologi dan data secara optimal dalam mendukung berbagai kebijakan pembangunan.

Informasi geospasial memainkan peran penting dalam pembangunan kota, karena data ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi wilayah, sumber daya, serta kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa M.Si, dalam mewujudkan visi Palembang Emas Darusalam yakni pemerataan pembangunan secara menyeluruh di Kota Palembang, Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Kota Palembang merupakan media untuk mengembangkan data dan informasi yang berkualitas dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang cepat dan tepat sasaran di Kota Palembang. Dengan memanfaatkan data geospasial, pemerintah dapat lebih mudah

mengidentifikasi area yang membutuhkan prioritas, seperti wilayah rawan bencana, kawasan yang perlu pengembangan infrastruktur, hingga daerah yang berpotensi menjadi pusat ekonomi baru. Selain itu, informasi geospasial memungkinkan perencanaan berbasis bukti yang lebih akurat, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi keberlangsungan pembangunan di Kota Palembang.

Informasi geospasial memberikan manfaat signifikan dalam mendukung efisiensi pembangunan Kota Palembang, khususnya dalam bidang pemetaan dan pengelolaan wilayah. Melalui Informasi geospasial, berbagai data spasial dapat dikumpulkan dan dianalisis secara komprehensif, memungkinkan identifikasi kawasan yang rawan bencana, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta perencanaan infrastruktur publik yang lebih merata dan responsif. Dengan data geospasial yang akurat, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan, seperti akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Selain itu, informasi geospasial dapat membantu mempermudah pelacakan perubahan penggunaan lahan dan kondisi lingkungan, yang penting bagi pengelolaan kota dalam jangka panjang.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) memegang peran penting dalam mengelola informasi geospasial. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Litbang bertugas menyusun, mengintegrasikan, dan menyediakan data geospasial yang relevan dan akurat untuk mendukung kebijakan pemerintah. Pengelolaan informasi geospasial ini diharapkan dapat memperkuat proses pengambilan keputusan

yang berbasis data, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan memiliki dasar informasi yang valid. Dengan demikian, peran Bappeda Litbang sangat krusial dalam memastikan bahwa Kota Palembang memiliki sistem informasi geospasial yang berkualitas dan mampu berkontribusi langsung pada pembangunan kota yang berkelanjutan.

Sinergitas antar-*stakeholder* menjadi elemen esensial dalam penyelenggaraan informasi geospasial Kota Palembang. Mengingat kompleksitas sistem geospasial yang melibatkan beragam aspek teknis dan non-teknis, kolaborasi di berbagai sektor sangat diperlukan guna menjamin keterpaduan data dan ketepatan informasi yang dihasilkan. Setiap pihak memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Sinergitas ini tidak hanya mendukung efektifitas penyelenggaraan informasi geospasial tetapi juga memastikan data yang dihasilkan dapat digunakan secara maksimal dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan penyelenggaraan informasi geospasial bergantung pada sejauh mana berbagai pemangku kepentingan mampu berkolaborasi dalam upaya menyediakan data geospasial yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses bagi seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak sangat penting untuk menjamin akurasi dan relevansi data yang dikumpulkan, karena masing-masing pihak memiliki perspektif, sumber daya, dan perbedaan keahlian. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya basis data yang komprehensif dan berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung pengambilan kebijakan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Penyelenggaraan informasi geospasial di Kota Palembang tentunya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya keterampilan teknis di beberapa instansi pemerintah, juga dalam hal koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Belum semua instansi memiliki tenaga ahli di bidang geospasial, sehingga proses pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data tidak selalu optimal. Komunikasi dan koordinasi juga dapat memengaruhi penyelenggaraan karena merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan data geospasial di Kota Palembang. Keterbatasan ini menuntut adanya perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kapasitas teknis dan finansial. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan informasi geospasial dapat beroperasi secara efektif dan efisien, sehingga data yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan kota.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi penggunaan data geospasial bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan adanya teknologi yang memadai, informasi geospasial dapat diakses dengan cepat dan akurat, sehingga mendukung berbagai kebutuhan perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelayanan publik. *Platform digital* dan perangkat lunak khusus memungkinkan data geospasial untuk disajikan dalam bentuk peta interaktif atau aplikasi, yang dapat diakses oleh berbagai kalangan sesuai dengan kebutuhan. Kemudahan akses ini tidak hanya memfasilitasi kolaborasi antar-*stakeholder* dalam pemanfaatan data, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya kota. Teknologi informasi berperan

sebagai penghubung yang menjadikan data geospasial lebih relevan dan mudah diintegrasikan dalam setiap proses pembangunan yang berkelanjutan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar-*stakeholder* merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan sistem informasi, termasuk dalam penerapan data geospasial yang memerlukan koordinasi lintas sektor. Sistem informasi geospasial yang efektif melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda, seperti Bappeda Litbang yang menjadi koordinator utama, memfasilitasi perencanaan, pengumpulan, serta integrasi data geospasial lintas sektor untuk mendukung perencanaan pembangunan kota secara menyeluruh. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berfokus pada pengelolaan infrastruktur teknologi yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data dengan aman dan efisien. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyumbangkan data terkait infrastruktur fisik, seperti jalan dan bangunan, serta membantu dalam penyediaan peta dasar yang penting bagi analisis tata ruang. Melalui sinergi ini, instansi tersebut bekerja sama dalam mewujudkan sistem informasi geospasial yang efektif demi kemajuan pembangunan di Kota Palembang..

Pentingnya kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial di tingkat lokal tidak dapat dipandang sebelah mata. Peraturan yang jelas dan komprehensif memberikan panduan yang tegas bagi setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan data geospasial, sehingga tercipta sistem yang terintegrasi dan akuntabel. Beberapa landasan hukum yang mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, yang mengatur tentang

kewajiban penyelenggaraan informasi geospasial yang akurat, terkini, dan dapat diakses oleh publik, serta mengatur mengenai standar informasi geospasial. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menetapkan prinsip integrasi dan standardisasi data antar instansi pemerintah, yang mencakup data geospasial, untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional. Di tingkat daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Geospasial Daerah mengatur penggunaan data geospasial dalam perencanaan pembangunan daerah dan pemanfaatannya dalam mendukung kebijakan publik. Dengan landasan hukum yang kuat ini, setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan informasi geospasial, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, dapat bekerja sesuai dengan pedoman yang berlaku, sehingga tercapai koordinasi yang efektif dan optimal dalam pengelolaan data geospasial di Kota Palembang.

Meskipun terdapat landasan hukum yang mendukung, penyelenggaraan informasi geospasial di Kota Palembang masih menghadapi sejumlah kendala yang dapat menghambat efektivitas implementasinya. Penelitian ini mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara standar sinergi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Undang-Undang ini menetapkan bahwa instansi pemerintah, termasuk Bappeda Litbang, harus berkoordinasi dan bekerja sama secara efektif dengan para *stakeholder* dalam penyelenggaraan informasi geospasial yang akurat dan dapat diakses. Namun, dalam praktiknya, beberapa kendala muncul, seperti perbedaan prioritas antar-instansi, tujuan yang beragam dari masing-masing *stakeholder*, serta

kurangnya komunikasi yang berkelanjutan. Hambatan ini mempersulit tercapainya sinergi yang diharapkan dan berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan informasi geospasial di Kota Palembang, yang sangat penting dalam upaya untuk meraih *Bhumandala Award*.

Bhumandala Award diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan penghargaan bergengsi di tingkat nasional yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil mengelola informasi geospasial secara optimal. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah memanfaatkan data geospasial sebagai instrumen utama dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah. Melalui *Bhumandala Award*, pemerintah pusat berharap dapat mengapresiasi dan memotivasi daerah-daerah yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola informasi geospasial. Dengan pencapaian ini, pemerintah daerah tidak hanya memperkuat ketepatan data yang dimiliki, tetapi juga menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi. Pencapaian *Bhumandala Award* menjadi salah satu target penting bagi Kota Palembang pada setiap penyelenggaraannya, bukan hanya sebagai penghargaan prestisius, tetapi juga sebagai simbol komitmen kota dalam menerapkan tata kelola berbasis data geospasial. Penghargaan ini akan memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan citra Palembang di tingkat nasional sebagai kota yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. *Bhumandala Award* juga dapat memperkuat posisi Palembang dalam menarik berbagai peluang investasi dan kerjasama yang memerlukan data geospasial berkualitas, sehingga mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memperoleh *Bhumandala Award* terkhususnya dalam tahun penyelenggaraan 2024, terdapat beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi, di antaranya integrasi data geospasial, keterbukaan akses, dan kualitas data yang terus diperbarui. Integrasi data mengacu pada kemampuan untuk menggabungkan berbagai jenis data geospasial yang ada di berbagai sektor, sehingga menciptakan sistem informasi yang holistik dan mudah diakses. Keterbukaan akses memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, guna mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, kualitas data yang terus diperbarui sangat penting agar informasi yang disediakan tetap relevan dan akurat, mengingat dinamika pembangunan yang terus berkembang. Pemenuhan kriteria ini akan menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan informasi geospasial yang efisien dan transparan, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di kota tersebut.

Untuk memenuhi kriteria *Bhumandala Award*, Kota Palembang perlu mengimplementasikan berbagai strategi, antara lain dengan meningkatkan pelatihan dan kapasitas teknis bagi aparat terkait serta memperbaiki infrastruktur teknologi yang mendukung sistem informasi geospasial. Pelatihan intensif bagi aparatur pemerintah akan memperkuat pemahaman dan keterampilan dalam mengelola data geospasial, sehingga dapat memastikan pengumpulan dan pemanfaatan data yang lebih akurat dan efisien. Selain itu, perbaikan infrastruktur teknologi, seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan data geospasial, menjadi faktor krusial untuk mendukung kelancaran sistem ini. Penguatan kapasitas di kedua aspek

ini akan mempercepat integrasi data antar-instansi, meningkatkan kualitas informasi yang tersedia, dan mempermudah aksesibilitas data bagi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan kota. Strategi ini diharapkan dapat mewujudkan sistem informasi geospasial yang handal dan memenuhi standar yang ditetapkan untuk meraih *Bhumandala Award*.

Bhumandala Award bukan hanya sekadar pencapaian prestasi, melainkan juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap warga dapat mengakses data geospasial yang akurat dan relevan untuk berbagai kebutuhan, termasuk dalam mitigasi bencana dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Penghargaan ini mendorong pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sistem informasi geospasial yang transparan dan dapat diakses secara luas, yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan di wilayah mereka. Dengan akses yang lebih mudah terhadap data geospasial, masyarakat dapat lebih aktif dalam merencanakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan, misalnya dengan memahami potensi risiko bencana atau memanfaatkan informasi terkait fasilitas umum dan infrastruktur yang ada. Selain itu, dengan kualitas data yang tinggi, pemerintah daerah dapat merencanakan kebijakan yang lebih tepat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi kesenjangan dalam penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, pencapaian *Bhumandala Award* akan memberikan dampak yang luas tidak hanya dalam aspek prestasi, tetapi juga dalam mewujudkan kota yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Menurunnya pencapaian Kota Palembang dari medali emas *Bhumandala Kanaka* pada tahun 2022 menjadi medali perak *Bhumandala Rajata* pada tahun 2024

mengindikasikan adanya tantangan dalam sinergitas antar-*stakeholder* yang berperan dalam pengelolaan jaringan informasi geospasial. Pencapaian medali emas sebelumnya mencerminkan keberhasilan kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan dalam memastikan kualitas, keterbukaan, dan pemanfaatan data geospasial secara optimal. Namun, penurunan ini menunjukkan bahwa sinergi yang diperlukan dalam mekanisme penyelenggaraan informasi geospasial mungkin tidak berjalan sebaik sebelumnya, sehingga menghambat upaya menjaga standar pengelolaan yang tinggi. Kendala ini menegaskan pentingnya sinergitas yang berkelanjutan dan konsisten di antara seluruh *stakeholder* agar Kota Palembang dapat kembali meraih prestasi tertinggi di masa depan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sinergitas antar-*stakeholder* dalam penyelenggaraan informasi geospasial di Kota Palembang. Penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi antara pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan data geospasial. Dengan memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam proses sinergitas antar-*stakeholder*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan integrasi dan pemanfaatan data geospasial di Kota Palembang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana informasi geospasial dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat kota.

Penelitian tentang sinergitas antara Bappeda Litbang dan *stakeholders* dalam pengelolaan informasi geospasial di Kota Palembang masih sangat terbatas, terutama

yang mengaitkannya dengan capaian strategis seperti *Bhumandala Award*. Meskipun teori koordinasi dan komunikasi yang dikemukakan oleh Najiyati dan Rahmat (2011) menekankan pentingnya sinergi dalam hal koordinasi dan komunikasi, penerapannya dalam konteks Kota Palembang menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Tim Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Kota Palembang, "*tantangan dalam sinergitas antar-stakeholder di Kota Palembang dalam penyelenggaraan informasi geospasial cukup kompleks, terutama dalam aspek koordinasi dan komunikasi. setiap instansi atau stakeholder sering kali memiliki prioritas, agenda, dan tujuan masing-masing, sehingga menyelaraskan kepentingan ini memerlukan pendekatan komunikasi yang efektif dan berkelanjutan.*" Pernyataan ini mengindikasikan bahwa sinergi antara Bappeda Litbang dan *stakeholders* dalam upaya mencapai *Bhumandala Award* sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan melalui komunikasi yang terus-menerus dan koordinasi yang kuat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Sinergitas Bappeda Litbang dengan *Stakeholders* pada Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Kota Palembang dalam Mencapai *Bhumandala Award*. Bagaimana sinergitas ini dibangun melalui koordinasi dan komunikasi yang efektif, serta bagaimana upaya kolaboratif ini mampu meningkatkan kualitas informasi geospasial di Kota Palembang. Pertanyaan ini mendasari perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana Bappeda Litbang dan para *stakeholder* bekerja sama dalam penyelenggaraan informasi geospasial, serta sejauh mana pendekatan koordinasi dan komunikasi yang diterapkan dapat memperkuat sinergitas menuju pencapaian *Bhumandala Award*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana sinergitas Bappeda Litbang dengan *Stakeholders* pada Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Kota Palembang dalam mencapai *Bhumandala Award* tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana sinergitas Bappeda Litbang dengan *stakeholders* pada penyelenggaraan informasi geospasial di Kota Palembang dalam mencapai *Bhumandala Award* tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi mengenai sinergi antar-*stakeholder* dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang kolaborasi antar-*stakeholder* dalam penyelenggaraan informasi geospasial, terutama dalam mencapai penghargaan nasional seperti *Bhumandala Award* bagi para pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, L. H. A., & Wijayanti, R. A. (2019). Pemanfaatan Sistem Informasi Geospasial Online Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Pemanfaatan Tata Ruang. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Terapan*, 6(2), 62-66.
- Ayuningtyas, G. A. T. Sinergitas Antar Stakeholders dalam Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kota Surakarta. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 18(2).
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Research for education: An introduction to theories and methods*.
- Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: stakeholder identification and analysis techniques. *Public management review*, 6(1), 21-53.
- Dwinugraha, A. P. (2017). Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 2(1), 1-7.
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge university press.
- Hardiansyah, G. (2013). Analisis peran berbagai stakeholder dalam menyongsong era pembangunan KPH di Kabupaten Ketapang.
- Huang, H., Gartner, G., Krisp, J. M., Raubal, M., & Van de Weghe, N. (2018). Location based services: ongoing evolution and research agenda. *Journal of Location Based Services*, 12(2), 63-93.
- Kussanti, D. P. (2021). Strategi Media Komunikasi Badan Informasi Geospasial Dalam Memberikan Informasi Kepada Masyarakat. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 120-127.
- Soewarno, H. (1994). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. *Jakarta: CV Haji Masagung*.
- Hayati, N. (2014). Sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan/Bumn dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda. *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, 2.

- Kasali, R. (2005). *Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Language, 31(265p), 28cm.*
- Lexy, J. M. (2010). *Penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.*
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (Eds.). (2009). *Encyclopedia of communication theory (Vol. 1).* Sage.
- Mashita, S. M., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2023). Sinergitas Stakeholder dalam Program Kampung Tematik Kuliner di Kelurahan Jatingaleh Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review, 12(2), 409-427.*
- Maulidya, A. (2020). Sinergitas stakeholders dalam pengelolaan sampah di Kota Metro. *Jurnal Analisis Sosial Politik, 4(2), 50-57.*
- Najiyati, S., & Susilo, S. R. T. (2011). Sinergitas instansi pemerintah dalam pembangunan Kota Terpadu Mandiri. *Jurnal ketransmigrasian, 28(2), 113-124.*
- Rahmawati, T. (2014). *Sinergitas stakeholders dalam inovasi daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Romadona, M. R., & Setiawan, S. (2020). Komunikasi Organisasi Dalam Fenomena Perubahan Organisasi Di Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Communication of Organizations in Organizations Change'S Phenomenon in Research and Development Institution. *Jurnal Pekommas, 5(1), 91-104*
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Manajemen, Jilid 1 Edisi 13. Jakarta: Erlangga.*
- Roziqin, F., Zahro, F., & Yudono, A. **PEMBANGUNAN GEOPORTAL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM MENUNJANG KETERSEDIAAN DATA DAN PENINGKATAN KINERJA SDM KABUPATEN GRESIK.**
- Santoso, H., Muntasib, E. K. S. H., Kartodihardjo, H., & Soekmadi, R. (2015). *Peranan dan kebutuhan pemangku kepentingan dalam tata kelola pariwisata di Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara.* Forestry Research, Development and Innovation Agency.

Whetten, D. A., & Cameron, K. S. (2016). *Developing management skills* (9th ed.). Pearson.

Yulfa, A. (2023). PERAN STAKEHOLDERS DALAM PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. *JURNAL BUANA*, 7(2), 436-450.

Yusrafitri, S. R. (2022). Sinergitas Stakeholders Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Masa Pandemi Covid-19. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 2123-2137.

Perundang-Undangan

Indonesia. (2011). Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Indonesia. (2014). Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Indonesia. (2019). Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Geospasial Daerah.

Pemerintah Kota Palembang. (2011). Surat Keputusan Wali Kota Palembang No. 221 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Pemerintah Kota Palembang. (2020). Surat Keputusan Wali Kota Palembang No. 190 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.